

Adeng Muchtar Ghazali & Busro

p-ISSN: 1412-1697; e-ISSN: 2477-3816
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar>

Pendidikan Islam dalam Dinamika Kehidupan Beragama di Indonesia

Adeng Muchtar Ghazali

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: amgy@uinsgd.ac.id

Busro

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: busro@uinsgd.ac.id

Abstrak

Tulisan ini untuk memahami realitas kehidupan beragama di Indonesia dalam hubungannya dengan proses pendidikan Islam. Masyarakat Indonesia adalah heterogen, plural, baik dari sisi etnis, budaya, dan kepegangan agama. Keragaman dalam menganut agama cenderung eksklusif, karena masing-masing memiliki keyakinan bahwa kebenaran agamanyalah yang paling benar (*truth claim*). Keharusan bertoleransi didengungkan dimana-mana, bahkan sudah menjadi kebijakan pemerintah melalui program kerukunan antar umat beragama. Sebagai muslim yang mayoritas, seringkali menjadi sasaran tuduhan “intoleran”. Islam memiliki doktrin tentang toleransi, sebagaimana ditunjukkan dalam tulisan sederhana ini. Doktrin toleransi ini perlu ditanamkan sejak usia dini, untuk menumbuhkan kesadaran bertoleransi. Toleransi adalah perilaku yang melekat dalam kepribadian setiap orang. Untuk menumbuhkan “perilaku” toleran ini, maka salah satunya melalui proses pendidikan agama Islam. Pendidikan menjadi representasi peradaban suatu masyarakat atau bangsa. Dalam konteks ini, masyarakat yang damai, aman, terbuka, saling menghargai dan menghormati perbedaan, sebagai bagian dari keberhasilan pendidikan dalam mencetak pribadi yang toleran dan beradab.

Kata Kunci: Toleran, Fenomena Kehidupan Beragama, Pendidikan Islam, *Truth Claim*

Fenomena kehidupan beragama memiliki daya tarik tersendiri sekaligus menyedot perhatian cukup besar dari semua kalangan. Beragam kasus telah kita lihat mulai dari betapa mudahnya mensesatkan antara satu faham keagamaan dengan faham keagamaan lainnya, penistaan agama, dan kawin campur antar

agama. Jika semua orang meyakini agama sebagai pedoman hidupnya, maka akan meyakini pula bahwa agama bernilai universal, dinamis, fleksibel, dan berorientasi ke depan. Agama apa pun tidak memiliki makna apa-apa jika tidak diikuti, diakui, dan diyakini sebagai kebenaran mutlak dan menjadi pedoman hidup bagi para penganutnya. Di sinilah dapat diketahui dinamika kehidupan beragama bergantung kepada para penganutnya.

Negara Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman budaya, suku, dan keyakinan agama dan faham keagamaan. Berkaitan dengan keragaman agama dan faham keagamaan ini, yang menjadi persoalan adalah bagaimana teologi atau keyakinan dari suatu agama mendefinisikan diri di tengah-tengah agama lain. Menyimak hasil Survei Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama tahun 2007 di 13 provinsi memperlihatkan tingkat ketaatan beragama masyarakat Muslim yang sangat tinggi. Sekitar 92 persen menunaikan shalat lima waktu, 63,5 persen melaksanakan shalat secara berjemaah, 97,3 persen menjalankan puasa di bulan Ramadhan, dan 77 persen mengeluarkan zakat/infak (A'la, 2015, hal. 7). Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama dengan berbagai intensitas menjalankan ibadahnya. Sering tidaknya orang pergi ke mesjid atau ke gereja, belum menunjukkan ketaatan beragama. Masih ada sekat atau kesenjangan antara keyakinan/doktrin dengan pengamalan, antara pelaksanaan kewajiban agama dengan kewajiban social. Melaksanakan ibadah solat, puasa, belum merefleksi pada pergaulan social. Praktek-praktek suap, korupsi, dan kemunkaran lainnya justru lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang konon biasa melaksanakan amalan ibadah. Inbilah kenyataan yang terjadi dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa melaksanakan kewajiban agama belum memiliki korelasi dengan kehidupan social. Islam didasarkan pada tiga prinsip hubungan yang tak terpisahkan yang mengandung aspek akidah dan etika social: hubungan manusia dengan Tuhan, manusia, dan alam. Sebagai sarana menuju kesempurnaan, puasa tentu saja tidak bisa dilakukan sembarangan. Sebagaimana kehidupan sosial, pelaksanaan puasa juga ada etikanya.

Dengan semakin berkembangnya pemahaman mengenai pluralisme agama, berkembanglah suatu paham *teologica religionum*. Paham ini menekankan semakin pentingnya berteologi dalam konteks agama-agama (Rahman, 1999, hal. 129). Melihat beberapa kasus dan pengalaman, pada tingkat pribadi hubungan antar tokoh agama di Indonesia mungkin tidak menjadi persoalan. Akan tetapi, pada tingkat teologis, yang merupakan dasar dari agama itu, muncullah kebingungan-

kebingungan, khususnya mengenai cara kita mendefinisikan diri ditengah agama-agama lain yang juga eksis.

Di sinilah pentingnya mensosialisasikan sekaligus menanamkan pemahaman agama yang bersikap terbuka, saling menghormati dan menghargai dalam pergaulan hidup manusia yang heterogen. Oleh karena itu, Pendidikan (Agama) Islam, sebagai bagian dari proses dinamikanya kehidupan beragama, memiliki peran yang sangat penting bagi upaya penanaman itu, terutama dalam menumbuhkembangkan kedewasaan berfikir dan kepribadian terbuka serta toleran ditengah-tengah masyarakat yang beragam para penganut agamanya. Sebagai sebuah proses, baik agama maupun pendidikan, di satu sisi, dan lingkungan social cultural dimana agama dan pendidikan itu berlangsung, semestinya saling bersinerji. Untuk itu, dalam tulisan ini memfokuskan pada hubungan dinamika kehidupan beragama yang pluralistik dengan proses pendidikan yang tengah berlangsung di Indonesia.

Pendidikan dan Pengembangan Kepribadian

Pendidikan (Agama) Islam bukanlah semata-mata hanya menyampaikan pengetahuan (*al-ta'lim*), tetapi juga melatih seluruh diri anak didik (*al-tarbiyah*). Demikian pula, fungsi guru bukan hanya sekedar menjadi seorang *mu'allim*, penyampai pengetahuan, tetapi juga seorang *murabbi*, pelatih jiwa dan kepribadian (Ma'arif, 2006). Inilah sebenarnya hakekat dari suatu pendidikan. Dalam prosesnya, tentu bukan merupakan upaya yang sederhana, tetapi suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Dinamika pendidikan selalu menunjukkan perubahan seiring dengan perubahan zaman. Pro kontra antara penting dan tidaknya ujian nasional misalnya, menunjukkan adanya respon masyarakat dalam menyikapi proses dan dinamika pendidikan sesuai dengan perkembangan zamannya. Disadari atau tidak, bahwa pendidikan menyangkut semua kepentingan orang, dan selalu menjadi fokus perhatian atau bahkan menjadi sasaran ketidakpuasan. Itulah sebabnya pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat (Fattah, 2004, hal. 1).

Pendidikan yang dalam bahasa Arab disebut *tarbiyyah* itu, merupakan derivasi dari kata *rabb*, sebagaimana dinyatakan dalam Alqur'an bahwa Allah sebagai Tuhan semesta alam (*rabb al-'alamin*), yaitu Tuhan yang mengatur dan mendidik seluruh alam. Dalam penegasan ayat ini, Allah memberikan informasi tentang arti penting perencanaan, penertiban, dan peningkatan kualitas alam (Roqib, 2009, hal. 14). Inilah, barangkali makna dari suatu proses pendidikan, manusia

diharapkan selaku memuji kepada Tuhan yang mendidik alam semesta karenanya manusia juga harus terdidik agar memiliki kemampuan untuk memahami alam yang telah di didik oleh Allah sekaligus mampu mendekatkan diri kepada Allah Sang Pendidik Sejati. Manusia senantiasa melakukan internalisasi secara kontinu (*istiqamah*) terhadap nilai-nilai ilahiyah agar mencapai derajat insan kamil.

Memahami pengertian tarbiyah di atas, maka didalamnya terkandung beberapa aspek penting, yaitu : 1) Pendidikan merupakan kegiatan yang betul-betul memiliki tujuan, sasaran, dan target; 2) Pendidik yang sejati dan mutlak adalah Allah Swt. Dialah Pencipta fitrah, Pemberi bakat, Pembuat berbagai sunnah perkembangan, peningkatan, dan interaksi fitrah sebagaimana Dia pun mensyariatkan aturan guna mewujudkan kesempurnaan, kemaslahatan, dan kebahagiaan fitrah tersebut; 3) Pendidikan menuntut terwujudnya program berjenjang melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan pengajaran selaras dengan urutan sistematika menanjak yang membawa anak dari suatu perkembangan ke perkembangan lainnya; dan 4) Peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Artinya, pendidik harus mampu mengikuti syariat agama Allah (An-Nahlawi, 1995, hal. 21).

Sebagai suatu sistem dalam proses pembinaan dan pengembangan manusia yang utuh, pendidikan Islam merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunianya, serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia hingga mampu meraih tujuan kehidupan sekaligus mengupayakan perwujudannya. Seluruh ide ini telah tergambar secara integratif dalam sebuah konsep dasar yang kokoh. Islam menawarkan konsep akidah yang wajib diimani agar dalam diri manusia tertanam perasaan yang mendorongnya pada perilaku normatif yang mengacu pada syariat Islam. Perilaku yang dimaksud adalah penghambaan manusia berdasarkan pemahaman atas tujuan penciptaan manusia itu, baik dilakukan secara individual maupun kolektif.

Penghambaan manusia dibimbing melalui dua aspek, yaitu : *pertama*, aspek keyakinan yang sekaligus menjadi landasan akidah yang mengakar dan integral, serta menjadi motivator yang menggugah manusia untuk berpandangan ke depan, optimistis, sungguh-sungguh, dan berkesadaran; *kedua*, aspek syariat yang telah mengembangkan berbagai kaidah dan norma yang dapat mengatur hubungan dan perilaku manusia. Dengan demikian, aspek penghambaan merupakan perilaku seorang manusia yang berupaya mewujudkan seluruh gambaran, sasaran, norma, dan perintah syariat tersebut. Di sinilah peran pendidikan sebagai sarana pengembangan kepribadian manusia agar seluruh aspek di atas menjelma dalam

sebuah harmoni dan saling menyempurnakan. Melalui penjelmaan ini, seluruh potensi manusia dipadukan dan dicurahkan demi mencapai suatu tujuan. Segala upaya, perilaku, dan getar perasaan, senantiasa bertitik tolsak dari tujuan tersebut (An-Nahlawi, 1995, hal. 34). Jelaslah, bahwa keimanan dan syariat menjadi landasan normatif dalam proses pendidikan, yaitu adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dicanangkan. Peran syariat dalam perubahan perilaku itu lebih menekankan pada unsur pengawasan, yaitu (1) pengontrol perilaku individu; (2) pengontrol perilaku sosial; dan (3) pengontrol perilaku politis (An-Nahlawi, 1995, hal. 74-76).

Sebagai pengontrol perilaku individu, seorang muslim akan menjadikan syariat sebagai acuan utama ketika dihadapkan pada suatu masalah. Pengembangan kontrol ini dapat disempurnakan melalui pengkajian ilmu. Artinya, setiap orang harus meluangkan waktunya untuk mencari ilmu, sehingga tidak ada seorang muslim pun yang bisa melarikan diri dari syariat. Sebagai pengontrol perilaku sosial, hukum-hukum dalam syariat akan menjadi konsep atau terminologi sosial. Dalam konteks ini, Islam memerintahkan kema'rufan dan melarang kemunkaran. Bagi Islam, meninggalkan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan salah satu indikator runtuhnya masyarakat. Sedangkan, syariat sebagai pengontrol perilaku politis mengandung makna bahwa jika sebuah pemerintahan menjalankan syariat, maka ajaran-ajaran tersebut akan menjadi perilaku politik yang dijalankan negara bersama seluruh rakyatnya. Dari ketiga pengontrol syariat ini, maka dalam proses pendidikan itu, syariat Islam mendidik manusia melalui tiga metode, yaitu : 1) Pendidikan psikologis, yang tujuan utamanya adalah diri sendiri. Pengontrol utamanya adalah rasa takut kepada Allah dan kecintaan kepada-Nya. Pelaksanaan syariat didasarkan atas perasaan takut terhadap murka dan azab Allah serta ingin memperoleh keridhaan Allah; 2) Saling menasehati serta berpesan dalam kebenaran dan kesabaran. Oleh karena itu, seseorang atau suatu masyarakat tidak akan membiarkan kemunkaran tumbuh; dan 3) Mewujudkan sistem pemerintahan Islam yang melaksanakan syariat dengan tujuan stabilisasi keamanan, pemantapan kekuasaan, serta keadilan syariat bagi manusia (An-Nahlawi, 1995, hal. 77).

Sejalan dengan pemikiran di atas, dalam konsep Islam, iman merupakan potensi rohani yang harus diaktualisasikan dalam bentuk amal shaleh, sehingga menghasilkan prestasi rohani (iman) yang disebut taqwa. Amal saleh itu menyangkut keserasian dan keselarasan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan dirinya yang membentuk kesalehan pribadi; hubungan manusia dengan sesamanya yang membentuk kesalehan sosial (solidaritas sosial),

dan hubungan manusia dengan alam yang membentuk kesalehan terhadap alam sekitar. Kualitas amal saleh akan menentukan derajat ketaqwaan (prestasi rohani/iman) seseorang dihadapan Allah Swt.

Kesadaran yang tinggi yang digerakkan oleh iman untuk melaksanakan ajaran agamanya, menjadi inti dan hakekat dari pendidikan Islam. Alquran secara jelas-jelas menegaskan, bahwa orang yang beriman dan berilmu memperoleh derajat yang tinggi dan mulia, baik dihadapan Allah maupun manusia. Barangkali, inilah salah satu makna dari tujuan pendidikan Islam sebagai salah satu proses pembentukan pribadi muslim. Sejalan dengan tujuan ini, Ahmad D. Marimba (1974, hal. 26) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum ajaran Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

Atas dasar itu, maka usaha pendidikan diproyeksikan kepada : 1) Pembinaan ketaqwaan dan akhlakul karimah yang dijabarkan dalam pembinaan kompetensi enam aspek keimanan, lima aspek keislaman, dan multi aspek keihisanan; 2) Mempertinggi kecerdasan dan kemampuan anak didik; 3) Memasukan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta manfaat dan aplikasinya; 4) Meningkatkan kualitas hidup; 5) Memelihara, mengembangkan, serta meningkatkan budaya dan lingkungan; dan 6) Memperluas pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarga, bangsa, sesama manusia, dan makhluk lainnya (Feisal, 1995, hal. 110).

Agama dan Dinamikanya

Dalam perspektif studi agama-agama (*religious studies*), sebutan ‘agama’ lebih focus pada “kepercayaan”. Sebab, dari sinilah dinamika kehidupan beragama dapat terlihat. Agama (*religion*) dan ‘keberagamaan’ (*religiosity*), adalah dua istilah yang tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan. Agama yaitu himpunan doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku, yang diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia. Sedangkan *religiosity*, istilah ini lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang diyakininya (Hidayat, 1998, hal. 41-42). Dalam kehidupan para penganut agama, antara doktrin dan penghayatannya tidak bisa dipisahkan. Keduanya menunjukkan dinamika kehidupan dalam beragama. Pada sisi lain, pengungkapan keyakinan agama seseorang atau sekelompok orang, akan berhadapan dengan berbagai keyakinan agama. Oleh karena itu, beberapa pandangan, teori, dan berbagai pengalaman telah muncul berkaitan dengan,

bagaimana keyakinan seseorang atau sekelompok orang bisa hidup berdampingan secara aman, damai, dan rukun dengan berbagai keyakinan lain yang berbeda itu.

Istilah “kehidupan beragama”, bisa kita lihat pandangan Emile Durkheim (1976, hal. 23-47) yang membedakan istilah “agama” (*religion*) dan “fenomena beragama” (*religious phenomena*). Agama menunjukkan pada keyakinan atau dogma, sementara fenomena beragama menunjukkan pada sikap mental dan perilaku keagamaan. Tentu, pembedaan ini lebih bersifat fungsional, yaitu untuk melihat agama dari sisi fungsi dalam kehidupan manusia (*the functional definition of religion*). Oleh karena itu, dari sisi fungsi agama dapat dilihat dari: (1) peranannya dalam masyarakat; (2) agama merupakan suatu sistem interpretasi terhadap dunia yang mengartikulasikan pemahaman diri dan tempat serta tugas masyarakat dalam alam semesta; (3) agama ditempatkan sebagai inti masyarakat; dan (4) agama merupakan bagian yang bersipat *konstitutif* terhadap masyarakat (Yewangoe, 2000, hal. 13). Dalam sejarah, makna agama justru ditentukan oleh peranannya dalam mengubah masyarakat. Ketika filosof Nietzsche mengatakan “Tuhan telah mati” hal ini bukan ditujukan kepada Tuhan, tetapi pada penganut agama yang tidak memiliki peran dalam memecahkan persoalan zaman. Di lingkungan Islam, ungkapan tersebut populer sebagai “pintu ijtihad tertutup”. Ungkapan ini bukan dari agama, tetapi dari para pelaku agama yang frustrasi akibat dari kekalahan dalam Perang salib. Sejak inilah, *metode taqlid* dalam memahami agama menjadi dominan, bahkan sampai sekarang. Tampak bahwa pengaruh para penganut agama dalam memberi peran dan makna terhadap agama sangatlah besar (Ghazali, 2005, hal. 15).

Secara internal, ragam faham keagamaan dapat disebabkan oleh “cara” penyikapan seseorang terhadap doktrin agama. Salah seorang penstudi agama, Joachim Wach melihat kecenderungan ini, bahwa keberagaman pemahaman ini dibentuk oleh karakteristik yang melekat dalam agama, yaitu *thought* (pemikiran) berupa sistem kepercayaan; *practice* (praktek-praktek keagamaan) berupa pengabdian dan upacara keagamaan; dan *followships* (kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga keagamaan) (Wach, 1984). Tinggi rendahnya kualitas beragama sebagai “perwujudan” kebenaran agama yang diyakininya itu, terletak pada manusianya, karena memang hanya manusia yang menganut agama. Untuk itu, Taufik Abdullah menguatkannya, bahwa memahami agama tiada lain adalah “memahami kebenaran agama dari realitas empiris”, yang berarti apa-apa yang diyakini dan diperbuat oleh manusia dalam kesehariannya sebagai manusia beragama (Abdullah, 1990, hal. xiii).

Secara empiris, keberagamaan seseorang akan dipengaruhi oleh struktur sosial, politik dan kultural dimana agama itu hidup dan berkembang. Dalam konteks ini, saya melihat mengapa “perwujudan” Islam di Indonesia bisa berbeda dengan Islam di Arab Saudi, Pakistan atau Mesir? Setiap agama tidak akan terhindarkan dari ciri yang “kompromistis” atau “akomodatif”. Sifat akomodatif terletak pada penghampiran manusia terhadap agamanya yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, kultur dan politis dimana ia hidup. Sebaliknya, sebagai sistem keyakinan, agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan suatu masyarakat dan menjadi pendorong tindakan-tindakan anggota masyarakat supaya tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agamanya (Ghazali, 2000, h. 26). Keragaman cara penyikapan inilah yang diingatkan oleh Nurcholish Madjid (1995), bahwa sistem nilai plural adalah sebuah aturan Tuhan (*Sunnatullah*) yang tidak mungkin berubah, diubah, dilawan, dan diingkari. Barangsiapa yang mencoba mengingkari hukum kemajemukan budaya, maka akan timbul fenomena pergolakan yang tidak berkesudahan. Memahami agama pada kenyataannya memahami pula keragaman cara penyikapan yang beragam, sekaligus didalamnya memahami budaya. Dari sini akan terlihat mana aspek agama yang menjadi budaya, menginspirasi lahirnya budaya, dan dapat memisahkan aspek budaya yang selaras dengan misi agama maupun sebaliknya. Agama dan sisi budaya saling mengisi. Dalam batas-batas tertentu, agama sebenarnya merupakan fenomena budaya. Persepsi manusia tentang yang ilahi, misalnya, bagaimanapun juga sangat terikat dengan latar belakang etnis dan kultur yang bersangkutan. Artinya, persepsi ini bukanlah menyangkut aspek ontologis (tentang adanya ke-ilahi-an), tetapi hanya soal bentuk pengalaman manusia terhadap Tuhan (Ghazali, 2000, hal. 9).

Toleransi Sebagai Doktrin Islam

Menurut Casram, sedikitnya ada dua tipe toleransi beragama: pertama, toleransi beragama pasif, yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Kedua, toleransi beragama aktif, yakni toleransi yang melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama (Casram, 2016, hal. 191).

Dalam ajaran Islam, keragaman pandangan, agama, budaya, dan etnis merupakan fitrah dan *sunnatullah* atau sudah menjadi ketetapan Tuhan. Sebagai ketetapan Tuhan, adanya perbedaan dan pluralitas ini tentu harus diterima oleh seluruh umat manusia. Penerimaan tersebut selayaknya juga diapresiasi dengan

kelapangan untuk mengikuti seluruh petunjuk dalam menerimanya. Mereka yang tidak bisa menerima adanya pluralitas berarti mengingkari ketetapan Tuhan. Berdasarkan hal ini pula maka toleransi menjadi satu ajaran penting yang dibawa dalam setiap risalah keagamaan, tidak terkecuali pada sistem teologi Islam. Dalam konteks ini, maka proses pendidikan memperhatikan aspek keragaman ini menjadi landasan dalam penyusunan kurikulum dan materi ajar pendidikan.

Konsepsi *tasamuh* atau toleransi dalam kehidupan keberagamaan pada dasarnya merupakan salah satu landasan sikap dan perilaku penerimaan terhadap ketetapan Tuhan. Toleransi beragama di sini tidak lantas dimaknai sebagai adanya kebebasan untuk menganut agama tertentu pada hari ini dan menganut agama yang lain pada keesokan harinya. Toleransi beragama juga tidak berarti bebas melakukan segala macam praktik dan ritus keagamaan yang ada tanpa peraturan yang ditaati. Toleransi dalam kehidupan beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain selain agama yang dianutnya dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatannya, serta memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing, tanpa harus bertabrakan dalam kehidupan sosial karena adanya perbedaan keyakinan tersebut.

Pengertian tentang *tasamuh* atau toleransi dalam kehidupan keagamaan yang ditawarkan oleh Islam begitu sederhana dan rasional. Islam mewajibkan para pemeluknya membangun batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan, sambil tetap menjaga prinsip penghargaan atas keberadaan para pemeluk agama lain dan menjaga hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Pembatasan yang tegas dalam hal akidah atau kepercayaan ini merupakan upaya Islam untuk menjaga para pemeluknya agar tidak terjebak pada sinkretisme.

Dalam ayat terakhir surat al-Kafirun di atas memberikan ketegasan, bahwa sikap toleransi memiliki batasan-batasan terutama berhubungan dengan masalah akidah. Ajaran Islam dengan tegas juga melarang para pemeluknya untuk berperilaku seperti para penganut agama lain. Namun, pada saat bersamaan Islam pun menyerukan untuk menghormati dan memandang orang lain yang berbeda agama sebagai pribadi yang utuh dengan segala hak dan kewajibannya yang mesti dihargai. Islam melarang para pemeluknya untuk mencaci-maki orang lain, dan melarang segala bentuk perlakuan yang bisa mencederai kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat.

Doktrin Islam berkaitan dengan kerukunan dapat dipahami pula dari fungsi Islam sebagai *rahmatat lil alamin*, yaitu pembawa rahmat dan kedamaian. Kata *Islam* menunjukkan arti "damai, selamat, penyerahan diri, tunduk, dan patuh."

Karakteristik ajaran Islam yang membawa fungsi *rahmatat lil alamin* itu diantaranya : 1) Islam menunjukkan manusia jalan hidup yang benar; 2) Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah secara tanggung jawab; 3) Islam menghormati dan menghargai manusia sebagai hamba Allah, baik muslim maupun yang beragama lain; 4) Islam mengatur pemanfaatan alam secara baik dan proporsional; dan 5) Islam menghormati spesifik individu manusia dan memberikan perlakuan yang spesifik pula (Wahyudin, hal. 1991).

Prinsip toleransi yang diwujudkan dalam bentuk keharusan hidup rukun, dapat dilihat dalam konteks : *pertama*; persaudaraan kemanusiaan universal, semua umat manusia adalah satu keturunan. Umat Islam meyakini bahwa Adam adalah “nabi” dan “rasul” yang pertama, dan Muhammad bin Abdullah adalah “nabi” dan “rasul” terakhir, dan bahkan meyakini pula bahwa “agama” nabi Adam tentulah “Islam”. Mereka berkeyakinan bahwa dari sejak nabi Adam sampai nabi Muhammad sama “agama”nya yaitu Islam. Pengertian “Islam” dimaksudkan adalah “tauhid”. Dalam al-Quran menyebut agama Ibrahim dan Ya’cub beserta keturunannya adalah Islam, dan agama nabi Yusuf adalah Islam. Demikian pula, istilah “Islam” dalam al-Quran muatannya adalah “nilai” bukan “institusi” atau “lembaga”. Hal ini difahami mengingat kata “Islam” dengan derivasinya tidak pernah disebut sebanding dengan kata Yahudi dan Nasrani sebagai sebuah institusi (agama yang terlembaga). Ketika al-Quran menyebut Yahudi dan Nasrani, juga Shobiin, digunakan istilah “*allazîna âmanû*” (orang-orang yang beriman).

Kedua, Islam mengajarkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci (*fitrah*). Dalam fitrahnya, setiap manusia dianugerahi kemampuan dan kecenderungan bawaan untuk mencari, mempertimbangkan, dan memahami kebenaran, yang pada gilirannya akan membuatnya mampu mengakui Tuhan sebagai sumber kebenaran tersebut. Kemampuan dan kecenderungan inilah disebut sebagai *hanif*. Atas dasar prinsip ini, Islam menegaskan bahwa setiap manusia adalah *homo religious*. Di dalam Alquran, manusia *hanif* ini diidentifikasi dengan Nabi Ibrahim yang dalam pencarian kebenaran pada akhirnya menemukan Tuhan yang sejati. Ibrahim dikenal sebagai panutan tiga agama wahyu : Yahudi, Kristen, dan Islam. Demikian pula, nabi Muhammad yang tahu betul tentang orang-orang *hanif* ini pernah menyatakan bahwa “Islam identik dengan Hanifiyyah”. Dinamakan demikian, karena “berserah diri” (*al-nafiyyah*) adalah agama Ibrahim, dan “orang yang berserah diri” (*al-hanif*) secara bahasa adalah orang yang ada dalam agama Ibrahim. Ibrahim disebut sebagai orang yang berserah diri karena

condong kepada kebaikan (Tarsyah, 2008, hal. 25). Maka, dalam Alquran Allah menegaskan bahwa Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani, melainkan seorang yang lurus dan berserah diri kepada Allah, dan tidak termasuk orang yang musyrik. Diperkuat pula oleh sabda Rasulullah, bahwa "agama yang paling dicintai oleh Allah adalah"berserah diri dan toleran" (Tarsyah, 2008, hal. 25).

Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah Swt dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial. Tuntutan visi ini mendorong dikembangkannya standar kompetensi sesuai dengan jenjang persekolahan secara nasional.

Melalui Pendidikan Agama Islam ini diharapkan, sekolah mampu menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan dan berbagai macam tuntutan baru dalam kehidupan yang semakin kompleks.

Usaha pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah diharapkan agar mampu membentuk kesalehan pribadi dan sekaligus kesalehan sosial sehingga pendidikan agama Islam diharapkan jangan sampai: (1) Menumbuhkan semangat fanatisme; (2) Menumbuhkan sikap intoleran dikalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia; dan (3) Memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan nasional. Walhasil pendidikan agama Islam diharapkan mampu menciptakan ukhuwah Islamiyah dalam arti luas, yaitu *ukhuwah fi al-'ubudiyah*, *ukhuwah fi al-insaniyah*, *ukhuwah fi al-wathaniyah wa al-nasab*, dan *ukhuwah fi din al-Islam*.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, dalam arti masyarakat yang serba plural, baik dalam agama, ras, etnis, budaya dan sebagainya, pembelajaran pendidikan agama Islam diharapkan mampu mewujudkan *ukhuwah Islamiyah* dalam arti luas tersebut. Sungguh pun masyarakat berbeda-beda agama, ras, etnis, tradisi, dan budaya, tetapi bagaimana melalui keragaman ini dapat dibangun suatu tatanan yang rukun, damai dan tercipta kebersamaan hidup serta toleransi yang dinamis dalam membangun bangsa Indonesia.

Memahami harapan umum dari kelangsungan Pendidikan Agama Islam tersebut, maka secara umum terdapat tema-tema utama yang dijadikan materi pelajaran dalam lingkup aspek-aspek Pendidikan Agama Islam, yakni: a) al-Qur'an Hadits; b) Keimanan; c) Fiqh; d) Akhlak; dan e) Tarikh.

Proses Pendidikan Islam dan Kerukunan

Istilah kerukunan mengandung pengertian bahwa kondisi sosial hubungan antar penganut agama telah mengalami pertentangan atau konflik. Secara politis, memang konflik dapat diatasi salah satunya melalui upaya rekonsiliasi antar penganut umat beragama di Indonesia. Akan tetapi, upaya untuk “menyadarkan” bahwa tiap-tiap agama membawa misi perdamaian dan keselamatan umatnya sering kali terabaikan. Kesadaran merupakan nilai universal dan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu, proses “rukun” melalui upaya penyadaran dalam beragama dapat dilakukan melalui upaya penyamaan visi, pemahaman, dan kesadaran terhadap eksistensi agama-agama, yaitu setiap agama secara esensial memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh tiap-tiap pihak yang berbeda keyakinan. Melarang berbuat jahat dan mengharuskan berbuat baik adalah salah satu nilai universal yang diajarkan oleh semua agama (Ghazali, 2000, hal. 11).

Pendekatan “Kerukunan” melalui dialog antar tokoh agama, terutama pada masa-masa Orde Baru sering dilakukan. Akan tetapi, kerukunan itu tetap terasa hampa. Sebab, yang ditekankan oleh pemerintah pada waktu itu bukan aspek kesadarannya, tetapi aspek stabilitasnya. Selama masa Orba, relatif tidak ada konflik antar pemeluk agama yang berbeda. Mungkin, orang mengira bahwa hal itu merupakan keberhasilan Orba dalam menerapkan konsep kerukunan. Namun ketika era reformasi muncul, Kasus Ambon, Aceh, Kupang, dan kasus-kasus lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia, seperti berbagai kerusuhan dan tindakan kekerasan yang berbau agama, konsep kerukunan antar umat beragama kembali dipertanyakan. Boleh saja, kita menduga-duga bahwa keberhasilan menerapkan kerukunan umat beragama di Indonesia semasa Orde Baru sejalan dengan kebijakan politis penguasa pada waktu itu, yakni stabilitas nasional demi berlangsungnya proses pembangunan nasional yang lebih menekankan pada pendekatan keamanan (*security approach*) (Ghazali, 2000, hal. 3).

Disnilah, kita akan melihat bahwa kerukunan tidak ada artinya kalau tidak didasari oleh pengetahuan, penghayatan, dan kesadaran agama, apalagi jika hanya mengandalkan pendekatan-pendekatan kelembagaan formal dan seremonial belaka, tanpa melihat nilai-nilai universal yang melekat pada diri manusia, seperti saling

menyayangi, menghormati, cenderung kepada nilai-nilai kebenaran, memahami dan menyadari perbedaan, dan sebagainya.

Dalam rangka kerukunan, setiap penganut agama sudah tentu harus memahami agamanya dan menyadari pula keragaman dan perbedaan dalam beragama. Dalam kajian-kajian teoritis, untuk memahami keragaman dan perbedaan kepegangan, paling tidak, terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan: Pendekatan *teologis*, *politis*, dan *sosial kultural*. Pendekatan *teologis* tiada lain adalah mengkaji hubungan antar agama berdasarkan sudut pandang ajaran agamanya masing-masing, yaitu bagaimana doktrin-doktrin agama “menyingkapi” dan “berbicara” tentang agamanya dan agama orang lain. Adapun pendekatan teoretis melalui analisis politik dilihat dalam konteks “kerukunan”, dengan maksud untuk melihat bagaimana masing-masing (penganut) agama memelihara ketertiban, kerukunan, dan stabilitas suatu masyarakat yang multi agama. Adapun pendekatan kultur ataubudaya adalah untuk melihat dan memahami karakteristik suatu masyarakat yang lebih menitikberatkan pada aspek tradisi yang berkembang dan mapan, yaitu agama dihormati sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang dimiliki oleh setiap manusia atau masyarakat (Ghazali, 2000, hal. 8).

Sebagai bagian dari dinamika kehidupan beragama, pendidikan Islam di Indonesia berlangsung di tengah-tengah masyarakat yang beragam faham agama dan keagamaan (pluralistik). Persoalan pluralitas beragama di Indonesia menjadi tantangan sekaligus harus direspon oleh semua elemen bangsa ini, termasuk didalamnya dunia pendidikan (Islam). Sebagai sebuah proses, maka pendidikan sangat berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya, yakni pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. Berdasarkan konsep pendidikan ini, maka sesungguhnya pendidikan merupakan pembudayaan atau “*enculturation*”, suatu proses untuk mentasbihkan seseorang mampu hidup dalam suatu masyarakat tertentu dengan keragaman budaya dan keyakinan. Konsekuensi dari pernyataan ini, maka praktek pendidikan harus sesuai dengan perkembangan masyarakat, sebab praktek pendidikan harus mendasarkan pada teori-teori pendidikan dan giliran berikutnya teori-teori pendidikan harus bersumber dari suatu pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan. Maka tidaklah heran kalau pendidikan bisa dipandang sebagai simbol peradaban, bahkan dapat dikatakan, bahwa maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa, akan

ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat bangsa tersebut (Halim, 2008).

Untuk itu, dinamika kehidupan beragama di Indonesia yang pluralistis memiliki nilai-nilai kerukunan. Penanaman nilai-nilai kerukunan penting dilakukan sejak usia dini, sehingga akan melahirkan kerukunan antara umat beragama yang kuat. Dalam konteks ini, Muhammad Maftuh Basyuni, mantan Menag RI menyatakan bahwa, "saya tidak yakin, jika seseorang memperoleh pemahaman agama dengan benar akan melahirkan fanatisme". Karena pentingnya pendidikan kerukunan ini, maka diperlukan rumusan tentang penambahan jam pelajaran agama dengan menitikberatkan silabus bermaterikan penunjang kesadaran beragama di tengah kemajemukan. Oleh karena itu, kerukunan hidup umat beragama perlu dimantapkan melalui lembaga pendidikan mulai tingkat SD hingga SLTA, karena merupakan sarana utama dalam memberikan pemahaman tentang keberagaman sejak dini pada siswa.

Wadah untuk mensosialisasikan nilai-nilai kerukunan melalui pendidikan tentu berhubungan dengan pengembangan kurikulum yang diaplikasikan melalui Proses Belajar Mengajar (PBM) dan *Habitulasi* seperti peneladanan, pembiasaan, dan penegakkan tata tertib. Dari kedua pendekatan proses pendidikan ini, akan melahirkan kesadaran beragama dilingkungan peserta didik. Model pengembangan kurikulum untuk materi ajar kerukunan umat beragama sudah ditentukan indikatornya, seperti saling menghormati, saling membantu, keterbukaan, dan kesipaan menerima perbedaan terintegrasi dengan komponen-komponen mata pelajaran PAI lainnya.

Di lingkungan penstudi agama-agama, misalnya Joachim Wach, setiap agama pasti merefleksi pada kehidupan nyata melalui tiga dimensi: pemikiran, perbuatan, dan persekutuan (Wach, 1958). Bagaimana setiap perintah dan amalan agama merefleksi dalam kehidupan nyata. Di sinilah pentingnya proses pembiasaan, yang dalam dunia pendidikan disebut dengan teori habituasi. Proses ini didalamnya, mengandung aspek kognitif, psikomotorik, kesadaran. Ibarat latihan, puasa yang tidak meningkat levelnya dari tahun ke tahun, berarti latihan selama sebulan penuh menjadi tidak ada artinya. Sebuah latihan disebut berhasil jika melahirkan peningkatan yang signifikan.

Tidak relevan lagi jika masih ada yang mempersoalkan apakah pendidikan agama perlu diajarkan disekolah atau tidak. Mengikuti logika Hamid Fahmy Zarkasyi (2003), bahwa "ide meniadakan pendidikan agama dengan alasan masih adanya dekadensi moral di masyarakat, rasanya terlalu simplistik. Sama halnya

dengan logika Gulliver Traveller, "jika sepatu anda kotor anda tidak perlu membersihkan karena nanti akan kotor lagi". Demikian juga jika ekonomi negara ini mundur maka pelajaran dan fakultas ekonomi baiknya dibubarkan. Maka, kebobrokan moral bangsa saat ini tidak dapat dinilai dari variable agama saja. Bahkan variable-variable dalam agama seperti jumlah pelaksana haji, jumlah masjid dan gereja, atau simbol-simbol ritual lainnya tidaklah cukup. Variable lain-lain seperti kebijakan politik pemerintah, rekrutmen pegawai, pembangunan supra struktur dan infra struktur dan lain sebagainya, selama ini tidak meletakkan peran agama secara proporsional. Korupsi, manipulasi, kolusi dan tindakan amoral lainnya sejatinya, adalah produk dari sistim yang tidak adil. Kotornya sungai Ciliwung bukan karena salah ulama atau pelajaran agama disekolah, tapi karena bobroknya sistim sanitasi yang dibangun pemerintah yang korup. Perampokan, pembunuhan, penipuan dan lain-lain adalah buah dari ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Di negara Pancasila ini, agama perlu masuk ke dalam urusan publik. Bahkan pemerintah perlu memasukkan kedalam setiap sistim secara jelas. Prinsip keadilan harus ditegakkan, "segala sesuatu diletakkan sesuai dengan tempat dan proporsinya." Pendidikan agama disekolah ditingkatkan dan kalau perlu ditambah. Dalam konteks UU Sisdiknas, khususnya pasal 13 ayat 1 yang memberi hak setiap siswa untuk memperoleh pendidikan dan guru agama sesuai dengan agama masing, sudah cukup adil. Jika hak warganegara memperoleh pendidikan agama dicabut, itu jelas tidak adil. Lebih tidak adil lagi jika semua siswa diwajibkan belajar semua agama (Zarkasyi, 2003).

Seyyed Hossein Nasr sebagaimana dikutip oleh Syamsul Ma'arif (2006), bahwa pendidikan agama Islam memiliki kepedulian dengan seluruh manusia untuk dididik. Tujuannya bukan hanya melatih pikiran, melainkan juga melatih seluruh wujud pribadi. Itulah yang menyebabkan mengapa pendidikan agama Islam bukan hanya menyampaikan pengetahuan (*al-ta'lim*), tetapi juga melatih seluruh diri siswa (*al-Tarbiyah*). Demikian pula, fungsi guru bukan hanya sekedar seorang *muallim*, penyampai pengetahuan, tetapi juga seorang *murabbi*, pelatih jiwa dan kepribadian. Dalam pelaksanaannya, memang tidaklah mudah upaya yang dilakukan oleh pendidikan, suatu kegiatan yang penuh tantangan dan dinamika. Proses pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perubahan dan perkembangan dinamika hidup masyarakat. Pendidikan berhubungan dengan kepentingan semua orang, baik pada kondisi sekarang maupun sebagai investasi dan kondisi kehidupan di masa yang akan datang. Untuk itulah pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan

peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat (Fattah, 2004, hal. 1).

Setidaknya, ada tiga sasaran prioritas dalam pemantapan kerukunan beragama di lembaga pendidikan, yakni guru, siswa dan kurikulum pendidikan. Ketiga sasaran ini merupakan keterpanduan yang masing-masing memiliki sinergi dalam menata dan menumbuhkan kerukunan hidup beragama. Fokus pendidikan kerukunan umat beragama adalah: (1) kesadaran dalam beragama yang dapat membentuk sikap dan perilaku hidup rukun dan damai; (2) mengarahkan untuk bersifat inklusif, artinya adanya suatu kemajemukan (pluralitas) dalam kehidupan beragama di Indonesia; dan (3) pemantapan kerukunan beragama dipandang perlu melalui eksistensi kurikulum yang berbasis kompetensi dalam rangka menunjang aspek moralitas dan akhlak serta menambah wawasan siswa dalam kehidupan beragama.

Mengembangkan mata pelajaran PAI berwawasan kerukunan hidup umat beragama menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam senantiasa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan berorientasi ke depan. Karena memang praktek pendidikan harus sesuai dengan perkembangan masyarakat, teori-teori pendidikan harus bersumber dari suatu pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan. Sebagai sebuah proses, maka pendidikan merupakan upaya sadar untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya, yakni pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. Demikian pula, jika dihubungkan dengan tujuan PAI, bahwa tujuannya memiliki sipat dinamis, ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan. Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Depdiknas, 2003, hal. 8).

Kesimpulan

Beberapa pokok pikiran, masalah, dan solusi berkaitan dengan realitas kehidupan beragama dalam hubungannya dengan proses pendidikan Islam di Indonesia, memberi ruang untuk memasukkan gagasan berupa betapa pentingnya masyarakat lebih mengetahui, memahami, dan menyadari adanya doktrin Islam untuk hidup rukun, saling menghormati, menghargai, dan kesiapan menerima perbedaan dalam pergaulan hidup sesama manusia beragama. Memberikan pengetahuan dan membiasakan hidup rukun ini, baik berbeda pemahaman di lingkungan internal maupun perbedaan keyakinan secara eksternal, mesti dilakukan melalui proses pendidikan sejak dini. Oleh karena itu, materi ajar pendidikan agama Islam salah satunya memiliki orientasi untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya saling mengormahi dan menghargai dalam pergaulan masyarakat yang beragam keyakinan (plural).

Daftar Pustaka

- Adeng Muchtar Ghazali, (2005), *Ilmu Studi Agama*, Pustaka Setia, Bandung
- Adeng Muchtar Ghazali, (2000), *Ilmu Perbandingan Agama*, Pustaka Setia, Bandung
- Abd A'la, (2015), "Dinamika Beragama", dalam Kompas, 30 Juli 2015
- Abdurrahman An-Nahlawi, (1995), *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, terjemahan Shihabuddin, Gema Insani Press, Jakarta
- Ahmad D. Marimba, (1974), *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Al-Ma'arif, Bandung
- Andreas Anangguru Yewangoe, (2009), *Agama dan Kerukunan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Andito, ed, (1998), *Atas Nama Agama*, Pustaka Hidayah, Bandung
- Adnan Tarsyah, (2008), *Manusia yang Dicintai dan Dibenci Allah*, Mizan, Bandung
- Abdul Halim F, (2008), "Pendidikan: Simbol Peradaban"; Sumber: <http://www.penulislepas.com>; 16 April 2008
- Casram, Casram. "Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2016): 187–98.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2003), *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*, Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, Jakarta
- Emile Durkheim, (1976), *the Elementary Forms of the Religious Life*, translated by Joseph Ward Swain, George Allen & Unwin LTD, London
- Hamid Fahmy Zarkasyi, (2003), "Negara, Pendidikan Agama, dan Moralitas Bangsa", *Harian Jawa Pos*, 26 Maret 2003, INSISTNET.COM
- Hamka, (1983), *Tafsir al-Azhar*, Juz III. Pustaka Panjimas, Jakarta
- Jusuf Amir Feisal, (1995), *Reorientasi Pendidikan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta
- Joachim Wach, (1958), *the Comparative Study of Religions*, Diedit dan diberi pengantar oleh Joseph M. Kitagawa, Columbia University Press, New York
- Nanang Fattah, (2004), *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung
- Nurcholish Madjid, (1995), *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Paramadina, Jakarta
- Moh. Roqib, (2009), *Ilmu Pendidikan Islam : Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, LkiS, Yogyakarta

- Sandra Kartika & M. Mahendra, (ed), (1999), *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman, Wacana Multi Kultural Dalam Media*, LSPP, Jakarta.
- Syamsul Ma'arif, (2006), "Islam dan Pendidikan Pluralisme, Menampilkan Wajah Islam Toleran melalui Kurikulum PAI berbasis Kemajemukan", *Makalah yang disampaikan dalam Annual Conference Kajian Islam*, Lembang Bandung, 26-30 Nopember 2006
- Taufik Abdullah & Rusli Karim, ed, (1990), *Metodologi Penelitian Agama*, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Wahyudin, dkk. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Grasindo
- Weinata Sairin, (Penyunting), (2006), *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa, Butir-Butir Pemikiran*, BPK Gunung Mulia, Jakarta

